



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG PURNOMO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama

SUGENG PURNOMO

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	1.Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
	2.Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%
	3.Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1.Nilai SAKIP	B
	2.Nilai PMPRB	30
	3.Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	4.Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp. 10.108.343.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

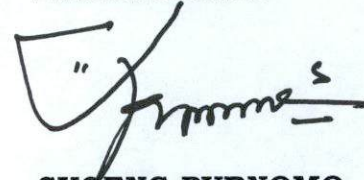
Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua



MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama



SUGENG PURNOMO